

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Sistem Hukum	20
B. Rekonstruksi Hukum	22
C. Sistem Perpajakan <i>Self Assessment</i>	23
D. Tinjauan Umum <i>Advance Ruling</i>	25
E. Pengaturan Surat Penegasan di Indonesia	30
F. Pengaturan <i>Advance Ruling</i> di Malaysia	32
G. Pengaturan <i>Advance Ruling</i> di Singapura.....	34
H. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Cara dan alat pengumpulan data.....	39
C. Jalannya Penelitian	40
D. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Analisis Mekanisme Advance Ruling di Indonesia, Malaysia dan Singapura	43
1. Konsep <i>Advance Ruling</i> dan Dasar Hukum Surat Penegasan	43
2. Mekanisme Surat Penegasan di KPP	54

3.	Mekanisme Surat Penegasan di Kantor Wilayah.....	56
4.	Mekanisme Surat Penegasan di Kantor Pusat	62
5.	Mekanisme Advance Ruling di Malaysia.....	68
6.	Mekanisme Advance Ruling di Singapura	88
B.	Analisis Perbandingan Mekanisme <i>Advance Ruling</i> dan Potensi Implikasinya Terhadap Kepatuhan dan Sengketa Pajak.....	104
1.	Perbandingan dan Pelajaran dari Malaysia dan Singapura.....	104
2.	Potensi Implikasi <i>Advance Ruling</i> Terhadap Kepatuhan dan Sengketa Pajak.....	113
C.	Rekonstruksi Mekanisme <i>Advance Ruling</i> Di Indonesia.....	118
1.	Problematika Surat Penegasan Sebagai Mekanisme <i>Advance Ruling</i>	118
2.	Proyeksi Pengaturan <i>Advance Ruling</i> di Indonesia	123
a.	Substansi Hukum.....	124
b.	Struktur Hukum	138
c.	Budaya Hukum.....	143
BAB V	PENUTUP	148
A.	Kesimpulan.....	148
B.	Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....		151
LAMPIRAN.....		156